

## Determinan Internet Financial Local Government Reporting di Indonesia

*ADITYA RAHMAN P\**

*SUTARYO*

*AGUS BUDIATMANTO*

*Universitas Sebelas Maret*

**Abstract:** *The focus in this study is internet financial local government reporting in Indonesia. After the government issued regulations on public disclosure, the government has to report such information. It has to cheap, simple, fast and timely. The internet is an appropriate medium for transparent reporting of public information by the local government. The sample in this study is 173 city government (regional) of the 497 total population.*

*This study uses five variables are adjusted to the local government in Indonesia. It is Political Competition, Size, Leverage, Local Government Wealth, and Local Government Type. The results showed that the Political Competition, Leverage, and Local Government Wealth proved significantly affect to the internet financial local government reporting. The findings of this study can be used by people as a means of control the local government performance based on the reporting of financial information on the Internet.*

**Keywords:** *local government financial statements, political competition, size, leverage, local government wealth, and local government type, internet financial local government reporting.*

---

\* Corresponding author: addt19@gmail.com

## A. Pendahuluan

Dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 mengenai pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, ditegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Semakin besarnya tuntutan terhadap pelaksanaan akuntabilitas sektor publik juga akan memperbesar kebutuhan atas transparansi informasi keuangan sektor publik (Nordriawan, 2006). Menurut Laporan Survei Indeks Persepsi Korupsi Indonesia oleh *Transparency International Indonesia*, rata-rata indeks korupsi di tingkat kota pada tahun 2006 mencapai angka 4,72, sedangkan pada tahun 2010 mencapai angka 4,93. Terjadi peningkatan sebesar 0,20 antara tahun 2006 hingga 2010. Akibatnya adalah munculnya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad (2012) menunjukkan bahwa rata-rata indeks tingkat pengungkapan informasi keuangan pada tahun 2012 terbukti lebih rendah daripada rata-rata indeks non keuangan. Berdasarkan penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa banyak pemerintah kota (kabupaten) yang masih kurang optimal dalam mengembangkan pelaporan keuangan melalui *website*-nya.

Penelitian yang dilakukan Laswad et.al., (2005) membandingkan karakteristik pemerintahan daerah yang menggunakan internet sebagai media pengungkapan dengan pemerintah daerah yang memilih untuk tidak menggunakan media internet. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pengungkapan laporan keuangan pemerintah daerah di internet dapat diprediksi berdasarkan tingkat *financial leverage*, *municipal wealth*, *press visibility* dan *council type*. Sedangkan *local authority size* dan *level of political competition* tidak dapat digunakan untuk memprediksi ada atau tidaknya *Internet Financial Reporting (IFR)* oleh pemerintah daerah di Selandia Baru.

Penelitian yang terkait dengan pengungkapan laporan keuangan belum banyak diterapkan pada laporan keuangan pemerintahan jika dibandingkan dengan perusahaan di sektor swasta karena terbatasnya informasi dari pemerintah yang dapat diakses publik dan sulitnya mengembangkan motif yang mendasari pengungkapan (Hilmi dan Martani, 2012). Akan tetapi, setelah diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, contohnya dengan memanfaatkan media internet. Berdasarkan pernyataan undang-undang tersebut, setiap data yang menunjang penelitian mengenai pelaporan informasi keuangan sektor publik seharusnya dapat diakses oleh setiap pemohon informasi publik dengan kejelasan atas penggunaan informasi tersebut. Sehingga penelitian-penelitian mengenai pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah khususnya melalui media internet akan lebih banyak dilakukan. Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh kompetisi politik (*political competition*), ukuran pemerintah daerah (*size*), *leverage*, kekayaan pemerintah daerah (*wealth*), dan *tipe pemerintahan (type)* terhadap *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)*.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi terhadap pelaporan evaluasi atas kinerja pemerintah daerah di internet, yaitu dengan cara melaporkannya melalui website pemerintah daerah. Melalui internet, informasi yang disampaikan akan lebih cepat dan mudah untuk diakses oleh siapapun, di manapun, dan dengan biaya yang lebih murah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk melakukan kerjasama di bidang keuangan atau tidak dengan suatu pemerintahan daerah baik berupa donasi, investasi, maupun dana pinjaman kepada pemerintah daerah. Bagi masyarakat penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi untuk mengetahui kinerja pemerintah daerah sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pengawasan kinerja keuangan

pemerintah daerah. Kedepannya, penelitian ini dapat menambah pengetahuan para akademisi tentang sektor publik dan menjadi referensi atas penelitian selanjutnya dalam hal sektor publik pada umumnya dan khususnya tentang pengungkapan laporan keuangan oleh pemerintah daerah di internet. Pembahasan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu: pendahuluan, rerangka teoritis dan pengembangan hipotesis, metode riset, analisis data dan pembahasan, simpulan, keterbatasan, dan implikasi.

## **B. Kajian Pustaka Dan Hipotesis**

### **1. Laporan Keuangan Sektor Publik**

Laporan keuangan sektor publik adalah representasi posisi keuangan dari sejumlah transaksi sektor yang dilakukan oleh suatu entitas sektor publik (Bastian, 2006). Menurut Bastian (2006), bentuk dan penyusunan laporan keuangan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti sifat lembaga sektor publik, sistem pemerintahan suatu negara, mekanisme pengelolaan keuangan, dan sistem anggaran negara. Keempat faktor ini sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi sektor publik. Hal ini juga dapat membedakan antara laporan keuangan sektor publik dengan sektor swasta. Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SPAP) No. 1, dalam rangka untuk memenuhi tujuan umum atas laporan keuangan daerah, maka dalam penyajian laporan keuangan harus menyediakan informasi mengenai entitas pelaporan sebagai berikut:

#### **a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)**

Laporan Realisasi Anggaran mengungkapkan kegiatan keuangan pemerintah pusat/daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBN/APBD. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah dalam satu periode pelaporan. Dalam penyajian laporan realisasi anggaran setidaknya harus memuat unsur

pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran.

b. Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Neraca menyajikan secara komparatif dengan periode sebelumnya pos-pos kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang pajak dan bukan pajak, persediaan, investasi jangka panjang, aset tetap, kewajiban jangka pendek, kewajiban jangka panjang, dan ekuitas.

c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan. arus masuk dan keluar kas diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

d. Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Laporan Arus Kas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan, seperti kewajiban kontijensi dan komitmen-komitmen lainnya.

## 2. Pengungkapan Laporan Keuangan (*Disclosure*)

Evans (2003) dalam Suwardjono (2005) mengklasifikasikan tiga tingkat dari pengungkapan sebagai berikut.

- a. Pengungkapan memadai (*adequate disclosure*) adalah tingkat minimum yang harus dipenuhi agar *statement* keuangan secara keseluruhan tidak menyesatkan untuk kepentingan pengambilan keputusan yang terarah.
- b. Pengungkapan wajar (*fair or ethical disclosure*) adalah tingkat yang harus dicapai agar semua pihak mendapat perlakuan atau pelayanan informasional yang sama. Artinya, tidak ada satu pihakpun yang kurang mendapat informasi sehingga mereka menjadi pihak yang kurang diuntungkan posisinya.
- c. Tingkat penuh (*full disclosure*) menuntut penyajian secara penuh semua informasi yang berpaut dengan pengambilan keputusan.

Pengungkapan sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela. Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku, dalam hal ini pihak yang berwenang dalam menetapkan peraturan adalah Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Pengungkapan sukarela adalah pengungkapan informasi yang dilakukan secara sukarela oleh perusahaan tanpa diharuskan oleh peraturan yang berlaku atau pengungkapan melebihi yang diwajibkan.

Menurut Suwardjono, secara umum tujuan dari pengungkapan (*disclosure*) adalah menyajikan informasi yang dipandang perlu untuk mencapai tujuan pelaporan keuangan dan untuk melayani berbagai pihak yang memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Pasar modal merupakan sarana utama untuk pemenuhan dana dari masyarakat, karenanya pengungkapan dapat diwajibkan untuk tujuan melindungi, informatif, dan melayani kebutuhan khusus. Pengungkapan dimaksudkan untuk melindungi perlakuan manajemen yang mungkin kurang adil dan terbuka. Pengungkapan dimaksudkan untuk menyediakan informasi yang dapat membantu keefektifan pengambilan keputusan dari pengguna. Apa yang harus diungkapkan kepada publik dibatasi dengan apa yang dipandang bermanfaat bagi pemakai yang dituju sementara untuk tujuan pengawasan, informasi tertentu harus disampaikan kepada badan

pengawasan berdasarkan peraturan melalui formulir-formulir yang menuntut pengungkapan secara rinci.

### 3. Akuntabilitas dan Transparansi

Penyajian laporan keuangan pemerintah daerah merupakan bentuk nyata dari adanya akuntabilitas dan transparansi keuangan daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 3, “Informasi Keuangan Daerah yang disampaikan harus memenuhi prinsip-prinsip akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan”. Menurut Mardiasmo, akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah (*agent*) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Akuntabilitas publik terdiri dari dua jenis, yaitu: akuntabilitas vertikal (*vertical accountability*) dan akuntabilitas horisontal (*horizontal accountability*) (Mardiasmo, 2009). Pertanggungjawaban vertikal adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana kepada otoritas yang lebih tinggi. Sedangkan pertanggungjawaban horisontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas.

Pada setiap akhir tahun anggaran dan periode pemerintahan kepala daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada DPRD sebagai wakil dari masyarakat yang telah mempercayakan pengelolaan sumber daya daerah. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1 menyebutkan bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Pasal 12 bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Sistem Informasi Keuangan Daerah adalah

menyajikan Informasi Keuangan Daerah secara terbuka kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi maka diharapkan setiap warga negara dapat berperan aktif dalam melakukan pengawasan atas jalannya pemerintahan.

#### 4. Pelaporan Keuangan di Internet

Pengembangan pelaporan keuangan berbasis internet merupakan perkembangan dari praktik akuntansi pengungkapan yang ada meskipun perkembangan praktik ini tidak didasari dengan standarisasi pengungkapan informasi keuangan di internet. Informasi perusahaan yang diberikan melalui media website merupakan pengungkapan sukarela dan tidak diregulasi oleh badan tertentu pada beberapa negara berkembang, seperti juga di Indonesia (Almilia, 2008). Pemerintah daerah juga telah menggunakan media internet untuk menyampaikan informasi kepada pengguna. Melalui *website* pemerintah daerah, informasi tersebut akan tersampaikan dengan tepat waktu. Semakin cepat waktu penyajian laporan keuangan, maka akan semakin baik untuk pengambilan keputusan (Mardiasmo, 2009). Permasalahan yang sering muncul adalah ketika kebutuhan akan informasi semakin banyak, maka waktu yang dibutuhkan untuk menghasilkan berbagai informasi tersebut juga semakin banyak. Sebagaimana diungkapkan dalam PSAK No. 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan, “Manfaat suatu laporan keuangan akan berkurang jika laporan tersebut tidak tersedia tepat pada waktunya. Suatu perusahaan sebaiknya mengeluarkan laporan keuangannya paling lama 4 (empat) bulan setelah tanggal neraca. Faktor-faktor seperti kompleksitas operasi perusahaan tidak cukup menjadi pembenaran atas ketidakmampuan perusahaan menyediakan laporan keuangan tepat waktu.”

#### 5. Pengembangan Hipotesis

Menurut Cooper dan Schindler (2006) dalam suatu riset, sebuah hipotesis mempunyai beberapa fungsi penting, antara lain: menuntun arah studi; mengidentifikasi fakta yang relevan dan yang tidak; menyarankan bentuk desain riset mana yang mungkin paling cocok;

memberikan kerangka untuk menyusun kesimpulan yang dihasilkan. Pengembangan dari hipotesis yang diajukan dan akan diuji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

### ***Political Competition***

Berdasarkan penelitian Laswad et.al., (2005) dijelaskan bahwa terdapat hubungan positif antara kompetisi politik dan *Internet Financial Reporting (IFR)*. Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan secara sukarela juga akan semakin tinggi. Internet merupakan sarana paling mudah dan murah bagi pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan sebagai bukti kinerja pemerintah daerah yang dapat diakses oleh masyarakat. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

***H1: Political competition berpengaruh terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).***

### ***Local Government Size***

Pada umumnya, pemerintahan daerah dengan ukuran besar memiliki jumlah dan transfer kekayaan yang besar. Laswad et.al., (2005) menghubungkan kinerja terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)* dengan ukuran pemerintah daerah. Dari penelitian tersebut, dijelaskan bahwa terdapat hubungan antara ukuran pemerintah daerah yang digambarkan dengan seberapa besar aset pemerintah daerah, dengan *Internet Financial Reporting (IFR)*. Tidak menjadi masalah bagi pemerintah daerah dengan total aset yang besar untuk melaporkan informasinya di internet. Hal ini dikarenakan besarnya total aset yang dimiliki masih sanggup untuk membiayai pelaporan keuangan di internet. Selain itu besarnya

total aset mendorong pemerintah daerah untuk melaporkan informasi keuangan sebagai bukti telah menyelenggarakan pemerintahan dengan baik.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

**H2** : *Size berpengaruh terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).*

### **Leverage**

Leverage merupakan kemampuan pemerintah daerah dalam menjamin dana yang dipinjam menggunakan jumlah aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Jumlah hutang yang dimaksud di sini mencakup jumlah dari hutang jangka panjang dan jangka pendek. Penting untuk *user* mengetahui laporan keuangan yang lebih rinci agar informasi mengenai *leverage* antar pemerintah daerah dapat diperbandingkan. Menurut Laswad et.al., (2005); Lestari dan Chariri (2007) *leverage* berpengaruh positif signifikan terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)*.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

**H3** : *Leverage berpengaruh terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).*

### **Local Government Wealth**

Menurut penelitian Laswad et.al., (2005) *municipal wealth* berpengaruh terhadap *Internet Financial Reporting (IFR)*. Dalam penelitian ini, kekayaan pemerintah mencerminkan kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya. Ketika kinerjanya baik, maka tidak menjadi masalah bagi pemerintah untuk melaporkan informasi keuangannya. Akan tetapi, Craven dan Martson, 1999 dalam Laswad et.al., (2005) menerangkan bahwa, pemerintahan daerah dengan kekayaan yang lebih kecil akan cenderung membatasi akses informasi

akuntansi kepada pengguna. Sehingga kecenderungan untuk menutupi atau bahkan tidak menyampaikannya secara sukarela di internet juga lebih besar.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

**H4** : *Wealth berpengaruh terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).*

#### ***Local Government Type***

Sebagaimana dalam Laswad et.al., (2005), diterangkan bahwa di daerah kabupaten masih kurang untuk tingkat pengungkapan secara sukarela di internet, jika dibandingkan dengan daerah kota dan provinsi, hal ini mungkin dikarenakan tingkat masyarakat dalam mengakses internet yang masih kurang. Menurut Serrano et.al., (2008):

*“In local authorities whose citizens make greater use of information technologies, an environment is created which stimulates governments to offer services and information, including e-disclosure via the Internet. The greater the proportion of Internet users, the greater is that of citizens potentially receptive to the consultation of this type of financial information via the Internet.”*

Daerah perkotaan merupakan daerah tujuan urbanisasi di mana kecenderungan masyarakatnya yang heterogen juga lebih tinggi. Berbagai macam kebudayaan, pekerjaan, tingkat pendidikan, serta tingkat kekayaan yang berimplikasi terhadap kecenderungan masyarakat perkotaan dalam mengakses internet cenderung lebih tinggi. Kecenderungan ini membuat pengawasan di daerah kota akan lebih tinggi, sehingga kecenderungan pemerintahan untuk secara sukarela melaporkan keuangan mereka juga lebih tinggi karena adanya tuntutan transparansi keuangan.

Berdasarkan penjelasan di atas, hipotesis dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut ini.

**H5** : *Type berpengaruh terhadap Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR).*

## C. Metode Penelitian

### 1. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

Populasi dalam penelitian ini meliputi pemerintah kota (kabupaten) di Indonesia. Sampel penelitian ini adalah laporan keuangan pemerintahan kota (kabupaten) di Indonesia tahun 2010 yang telah diaudit oleh Badan Pengawas Keuangan (BPK). Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria pengambilan sampel adalah pemerintah daerah kota (kabupaten) tahun 2010, pemerintah daerah yang mempunyai web dan dapat diakses, pemerintah daerah mempublikasi data dan informasi tentang DPRD, pemerintah daerah yang menerbitkan laporan keuangan pemerintah daerah dan diaudit oleh BPK RI dan menyajikan data dan informasi untuk pengukuran variabel penelitian.

#### INSERT TABEL 1

### 2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder. Data penelitian ini diperoleh dari pusat informasi dan komunikasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data dari laporan keuangan daerah pemerintahan kota (kabupaten) di Indonesia pada tahun 2010. Sedangkan data kompetisi politik diperoleh dari publikasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) dan *website* resmi masing-masing pemerintah daerah.

### 3. Definisi Operasional Variabel

#### a. Variabel Dependen

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet (*Internet Financial Local Government Reporting/IFLGR*). Pelaporan keuangan di internet dinilai dari ada tidaknya APBD, laporan keuangan

pemerintah daerah (LKPD), atau LAKIP pada situs resmi pemerintahan daerah. LKPD sendiri terdiri dari empat komponen, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan. *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)* dikelompokkan menjadi dua, yaitu pemerintah daerah yang melaporkan informasi keuangannya di internet atau *Internet Financial Reporting (IFR)* dan pemerintah daerah yang tidak melaporkan informasi keuangan di internet atau *Non Internet Financial Reporting (N-IFR)*.

#### b. Variabel Independen

Variabel independen dalam penelitian ini mengacu dalam penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Laswad et.al., (2005). Akan tetapi berdasarkan penelitian tersebut, terdapat satu variabel independen yang tidak digunakan dalam penelitian ini yaitu Press Visibility. Hal ini dikarenakan tingkat kesulitan untuk memperoleh data yang cukup tinggi. Penelitian ini menggunakan lima variabel independen yaitu *Political Competition*, *Local Government Size*, *Leverage*, *Local Government Wealth*, dan *Local Government Type*. Adapun variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam table berikut.

#### INSERT TABEL 2

#### c. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model *binary logistic regression* karena variabel dependen dalam penelitian ini adalah kategorial, yaitu *Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)* dengan kategori pemerintah daerah yang mempublikasikan laporan keuangan di internet dilambangkan dengan angka 1 dan sebaliknya.

$$LN \frac{P}{P-1} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 X_5$$

Notasi:

- $LN \frac{P}{P-1}$  = Probabilitas pemerintah daerah untuk *Internet Financial Reporting* dan *Non Internet Financial Reporting*
- $X_1, X_2 \dots X_5$  = Pengukuran atas *POLCOM, SIZE, LEV, WEALTH, TYPE*
- $\beta_0, \beta_1, \beta_2 \dots \beta_5$  = Koefisien regresi

Selanjutnya, analisis pengujian model regresi logistik perlu memperhatikan : 1) *Nilai likelihood*, digunakan untuk menunjukkan apakah dengan penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat memperbaiki model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian., 2) *Nilai Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*, digunakan untuk membuktikan bahwa data empiris sesuai dengan model regresi dalam penelitian atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan *fit.*, 3) *Uji Nilai Nagelkerke R<sup>2</sup>*, mirip dengan nilai koefisien determinasi (R<sup>2</sup>) dalam pengujian dengan model regresi berganda yang menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabilitas variabel dependen dalam model yang digunakan oleh penelitian ini., 4) *Uji Estimasi Parameter Atau Koefisien Regresi*, merupakan nilai yang menggambarkan besaran dan arah pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dalam model regresi. Selain itu, dengan pengujian ini dapat diketahui nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan simpulan di dukung atau tidak didukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

## D. Analisis Data

### 1. Deskripsi Data

#### INSERT TABEL 3

Berdasarkan Tabel 2, Sampel (N) adalah 173 buah. Dari 173 sampel tersebut variabel *TYPE* dan *IFLGR* mempunyai nilai minimum dan maksimum yang sama yang dikarenakan terdapat kesamaan pengukuran yaitu menggunakan variabel *dummy*. Nilai minimum *TYPE* dan *IFLGR* adalah sebesar 0,00 dan nilai maksimumnya adalah sebesar 1,00. Nilai mean dari *TYPE* sebesar 0,2312 dan *IFLGR* sebesar 0,3757. Sedangkan standar deviasi dari *TYPE* sebesar 0,42283 dan *IFLGR* sebesar 0,48571.

Sementara itu, untuk variabel *SIZE* merupakan variabel dengan rata-rata tertinggi. Nilai minimum untuk variabel *SIZE* adalah 25,46 (Kota Surakarta) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 32,80 (Kota Magelang). Nilai rata-rata dan standar deviasi untuk *SIZE* adalah sebesar 28,0779 dan 0,79688. Nilai minimum untuk *LEV* adalah 0,0000056 (Kabupaten Barito Utara) dan nilai maksimumnya adalah sebesar 0,1526570 (Kabupaten Minahasa Selatan). Nilai rata-rata dan standar deviasi terendah terdapat dalam variabel *LEV* dengan nilai rata-rata adalah 0,008550175 dan 0,0164952134 untuk standar deviasinya. Standar deviasi tertinggi terdapat dalam variabel *IFLGR* yaitu sebesar 0,48571. Sedangkan untuk variabel *POLCOM* dan *WEALTH* memiliki nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata, standar deviasi berturut-turut sebagai berikut: 0,02 (Kabupaten Pasuruan); 0,71 (Kabupaten Purbalingga); 0,2899; 0,15278 dan 0,01 (Kabupaten Minahasa Selatan); 1,00 (Kabupaten Bantul); 0,0706; 0,08451.

### 2. Uji Nilai Likelihood

Uji nilai *likelihood* digunakan untuk menguji model *binary logistic regression*. Uji ini menunjukkan apakah dengan penambahan variabel bebas ke dalam model regresi dapat

memperbaiki model regresi dalam memprediksi variabel dependen penelitian. Uji ini didasarkan pada nilai  $-2\text{LogL}$  baik pada *block* 0 maupun *block* 1. Hasil pengujian model regresi diperoleh nilai  $-2\text{LogL}$  sebesar 36,188 dan nilai probabilitas 0,000 yang lebih kecil dari tingkat signifikansi penelitian sebesar 5%. Hasil ini mengindikasikan bahwa penambahan variabel independen berupa *POLCOM*, *SIZE*, *LEV*, *WEALTH*, dan *TYPE* dapat memperbaiki model *fit* dalam model *binary logistic regression* penelitian ini.

### 3. Uji Nilai *Hosmer and Lemeshow's Goodness of Fit Test*

Uji ini dilakukan untuk membuktikan bahwa data empiris cocok atau sesuai dengan model regresi dalam penelitian atau tidak ada perbedaan antara model dengan data sehingga model penelitian dapat dikatakan *fit*. Jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* lebih kecil atau sama dengan tingkat signifikansi penelitian 5%, maka terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasinya sehingga *goodness fit* model tidak baik karena model tidak dapat memprediksi observasinya. Sebaliknya, jika nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* lebih besar dari 5%, maka model mampu memprediksi nilai observasi atau dapat dikatakan bahwa model dapat diterima karena cocok dengan data observasi penelitian. Hasil pengujian nilai *Hosmer and Lemeshow's goodness of Fit test* dalam penelitian ini menunjukkan angka sebesar 12,982 dengan nilai probabilitas atau signifikansi sebesar 0,112. Hasil ini mengindikasikan bahwa model penelitian ini adalah *fit* dan dapat digunakan sebagai model untuk memprediksi observasi dalam penelitian.

### 4. Uji Nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>*

Uji nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* mirip dengan nilai koefisien determinasi ( $R^2$ ) dalam pengujian dengan model regresi berganda yang menjelaskan seberapa besar variabel bebas mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen. Hasil pengujian nilai *Nagelkerke R<sup>2</sup>* dalam penelitian ini adalah sebesar 0,257 yang berarti bahwa variabilitas variabel

dependen dalam hal ini adalah pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet dapat dijelaskan oleh variabel independen *POLCOM*, *LEV*, dan *WEALTH* sebesar 25,7%. Sementara itu, variabilitas sisanya sebesar 74,3% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

##### 5. Uji Parameter *Logistic Regression*.

Setelah kelayakan model diuji dan diperoleh hasil bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak (*fit*) untuk digunakan sebagai model prediksi variabel pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet, maka pengujian berikutnya adalah uji estimasi parameter atau koefisien dalam model regresi penelitian. Dengan mengetahui parameter atau koefisien regresi dalam pengujian regresi ini, maka dapat diketahui nilai dan arah pengaruh masing-masing variabel serta tingkat signifikansi prediksi terhadap kondisi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Selain itu, dengan pengujian ini dapat diketahui nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam penentuan simpulan di dukung atau tidak didukung hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Hasil dari pengujian tersebut ditunjukkan dalam table berikut ini.

#### INSERT TABEL 4

Hasil pengujian dengan menggunakan model *binary logistic regression* seperti tersaji dalam tabel di atas menunjukkan nilai koefisien regresi, nilai *wald* dan nilai probabilitas untuk masing-masing variabel independen penelitian. Tabel di atas menunjukkan bahwa variabel *POLCOM*, *LEV*, dan *WEALTH* mempunyai nilai probabilitas yang lebih kecil dari tingkat signifikansi (*alpha*) penelitian yaitu 1%, 5% atau 10%. Nilai probabilitas untuk variabel *POLCOM*, *LEV*, dan *WEALTH* berturut-turut adalah 0,038; 0,051; dan 0,000. Nilai probabilitas untuk ketiga variabel tersebut di bawah level signifikansi penelitian 5%. Sehingga

dapat dinyatakan bahwa variabel *POLCOM*, *LEV*, dan *WEALTH* berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet pada tingkat keyakinan penelitiann 0,05.

Tabel di atas juga menunjukkan bahwa untuk variabel *SIZE* dan *TYPE* mempunyai nilai probabilitas lebih besar dari tingkat signifikansi penelitian 1%, 5% atau 10%. Hasil ini mengindikasikan bahwa variabel *SIZE* (0,920) dan *TYPE* (0,596) bukan variabel yang mempengaruhi probabilitas pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet pada tahun 2010 di Indonesia.

Hasil pengujian *binary logistic regression* dalam tabel di atas dapat digunakan sebagai dasar penyusunan model penelitian. Model *binary logistic regression* dalam penelitian ini adalah seperti berikut ini.

$$\ln \frac{P}{P-1} = -0,912 - 2,484 (POLCOM) - 0,026 (SIZE) - 41,367 (LEV) + 20,797 (WEALTH) - 0,266 (TYPE)$$

Estimasi parameter  $\beta$  yang digunakan untuk mengukur sejauh mana variabel independen mampu meningkatkan *log* probabilitas suatu *event* terjadi. Hasil analisis menunjukkan nilai koefisien dalam model regresi di atas sebesar: -2,484; -0,026; -41,367; 20,797; dan -0,266 serta nilai konstanta -0,912.

Karena tanda  $\beta_4$  positif, maka semakin besar *WEALTH* semakin besar juga pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Tanda  $\beta_1$ ,  $\beta_2$ ,  $\beta_3$ , dan  $\beta_5$  negatif maka semakin besar *POLCOM*, *SIZE*, *LEV* dan *TYPE*, maka semakin kecil pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Hasil menunjukkan bahwa H1, H3, dan H4 signifikan sehingga hipotesis tersebut dapat diterima . Sedangkan H2 dan H5 tidak signifikan sehingga hipotesis tersebut ditolak.

## E. Pembahasan

Hasil pengujian mengindikasikan bahwa terdapat tiga variabel independen yang signifikan terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet pada tahun 2010 di

Indonesia. Ketiga variabel tersebut antara lain kompetisi politik (*political competition*), *leverage*, dan kekayaan pemerintah daerah (*wealth*). Sedangkan dua variabel independen yang lain yaitu ukuran pemerintah daerah (*size*) dan tipe pemerintahan (*type*) tidak dapat digunakan untuk mengukur tingkat pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Semakin tinggi persaingan politik dalam pemerintah daerah, akan mendorong pemerintah daerah tersebut melaporkan informasinya di internet. Selain murah dan dapat diakses dengan mudah, pelaporan di internet juga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas pemerintahan daerah yang menjabat sekarang dengan ekspektasi terpilihnya kembali dalam pemilu mendatang. Dengan ini maka hipotesis pertama (*POLCOM*) terbukti mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Hipotesis kedua (*SIZE*) ditolak karena tidak terbukti signifikan mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Ukuran pemerintah daerah yang dinyatakan dengan aset mempunyai kemungkinan tidak berpengaruh oleh pelaporan keuangan di internet disebabkan oleh permasalahan akuntansi aset yang dihadapi oleh pemerintah daerah di Indonesia yang dibuktikan dengan pengecualian dalam opini audit BPK. Sebagian besar laporan keuangan pemerintah daerah yang diberi opini wajar dengan pengecualian mempunyai ketidakwajaran dalam hal aset sehingga dikecualikan. Selain itu, penggunaan internet membutuhkan sumber daya manusia yang familiar dengan teknologi informasi. Pelaporan informasi keuangan di internet juga mempertimbangkan kemampuan daerah baik kota maupun kabupaten dalam mengakses internet. Apabila pemerintah daerah dengan *size* yang besar tanpa diikuti oleh kemampuan daerah dalam mengakses internet yang baik, maka *size* tidak akan berpengaruh terhadap pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Sementara itu salah satu permasalahan lain yang dihadapi oleh pemerintah daerah khususnya pemerintah daerah di luar Jawa adalah kualitas sumber daya manusia, sehingga pemerintah daerah dengan jumlah aset yang besar tetapi mempunyai sumber daya manusia

yang berkualitas rendah tidak menjamin bahwa pemerintah daerah tersebut memanfaatkan teknologi informasi (internet) dalam pelaporan akuntabilitas dan transparansi informasi keuangan.

Melalui internet, baik informasi keuangan dan non keuangan yang dibutuhkan oleh pengguna sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi pemerintah daerah dapat digunakan untuk mengalihkan fokus utama masyarakat terhadap tingginya *leverage* pemerintah daerah. Dengan begitu, hipotesis ketiga (*LEV*) diterima karena terbukti positif mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet.

Hipotesis keempat (*WEALTH*) juga diterima karena terbukti positif mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Kekayaan pemerintah merupakan bukti nyata atas kinerja pemerintah daerah yang baik dalam mengelola keuangan pemerintah daerah. Sehingga semakin besar rasio pengelolaan belanja pemerintah daerah maka kecenderungan pemerintah daerah untuk melaporkan keuangannya di internet pun juga semakin tinggi, begitu juga sebaliknya.

Hipotesis kelima (*TYPE*) ditolak karena tidak dapat membuktikan adanya hubungan antara tipe pemerintah daerah kota ataupun kabupaten dengan pelaporan keuangan pemerintah daerah di internet. Baik kota maupun kabupaten mendapat kemampuan yang sama dalam mengakses informasi keuangan di internet. Menurut Menkominfo, M. Nuh, pemerintah menargetkan pada 2010 program internet masuk desa sudah terealisasi di seluruh Indonesia, sehingga rencana tindak lanjut menjadi desa pintar terwujud (dikutip tanggal 17 juni 2013 dari: [www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 2 Ayat 3 tentang Keterbukaan Informasi Publik, menyatakan bahwa setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana. Berdasarkan undang-undang tersebut, internet merupakan media yang dapat dengan cepat, tepat waktu, murah, dan sederhana untuk

mengakses informasi keuangan pemerintah daerah. Baik pemerintah kota maupun kabupaten yang telah melaksanakan undang-undang tersebut seharusnya telah melaporkan informasi keuangannya melalui internet, sehingga perbedaan tipe pemerintahan di kota maupun kabupaten tidak menjamin bahwa pemerintah daerah akan melaporkan informasi keuangannya.

## F. Penutup

### 1. Simpulan

Hasil pengujian data dalam penelitian mendasari pengambilan kesimpulan dari penelitian terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pelaporan keuangan pemerintah daerah di Internet. Sesuai dengan hasil penelitian Laswad et.al., (2005), *Leverage* dan *Local Government Wealth* terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet, sedangkan *Size* tidak terbukti mempengaruhi pelaporan informasi keuangan pemerintah daerah di internet. Akan tetapi, *Political Competition* dan *Type* menunjukkan hasil yang berkebalikan dengan penelitian Laswad et.al., (2005).

*Political Competition* terbukti berpengaruh terhadap pelaporan informasi keuangan di internet. Semakin tinggi level *political competition*, kecenderungan pemerintah daerah untuk menggunakan internet sebagai sarana pelaporan informasi keuangan yang mudah dan murah juga akan semakin tinggi. Informasi tersebut dapat mencerminkan bukti kinerja pemerintah daerah. Adanya bukti kinerja yang baik membuat pejabat daerah terpilih agar mendapat kepercayaan dari masyarakat yang telah memilihnya dahulu, serta dapat berekspektasi untuk memenangkan pemilu periode berikutnya.

Tipe pemerintah daerah tidak terbukti signifikan terhadap pelaporan informasi keuangan di internet. Baik pemerintah kota maupun kabupaten tidak memiliki hubungan signifikan terhadap tingkat pengungkapan (Martani, 2010).

## 2. Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian ini antara lain: sumber data yang digunakan adalah website pemda yang sebagian besar non aktif dan atau tidak dapat diakses, pengukuran pelaporan keuangan di internet menggunakan dummy tanpa mengakomodir kualitas konten, periode penelitian ini hanya satu tahun sehingga daya komparabilitas dan generalisasinya relatif kecil.

## 3. Saran

Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mencari sumber lain yang dapat dijadikan alternatif untuk mendapatkan sampel. Dengan begitu, data sampel berasal dari beberapa sumber yang dapat menambah kelengkapan data penelitian. Penggunaan variabel dummy dapat diganti menggunakan skala poin di mana dari tingkatan poin tersebut diklasifikasikan berdasarkan kualitas dari variabel tersebut. Penambahan periode data penelitian dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian antar periode.

## DAFTAR PUSTAKA

- Almilia, L. S. 2008. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengungkapan Sukarela Internet Financial and Sustainability Reporting*. Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia. 12 (2).
- Bastian, I. 2006. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- Cooper, D. R. dan Pamela S. S. 2006. *Business Research Methods*. Edisi Kesembilan. Jakarta: PT Media Global Edukasi.
- Hilmi, A. Z. dan D. Martani. 2012. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Pengungkapan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi. Simposium Nasional Akuntansi (SNA) XV. Banjarmasin. 20-23 September.
- Laswad, F., Richard F., dan Peter O. 2005. Determinants Of Voluntary Internet Financial Reporting By Local Government Authorities. *Journal of Accounting and Public Policy*. 24: 101-121.
- Lestari, H. S. dan A. Chariri. 2007. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelaporan Keuangan Melalui Internet (Internet Financial Reporting) Dalam Website Perusahaan*. Working Paper FE UNDIP.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martani, D. dan A. Lestari. 2010. Local Government Financial Statement Disclosure In Indonesia. *Annual Meeting and Conference Asian Academic Accounting Association (AAAA)*. Thailand. 28 November-1 Desember.
- Muhammad, Bagus H. P. 2012. *Analisis Tingkat Pengungkapan Informasi Keuangan Dan Non Keuangan Dalam Perspektif E-Government Pada Website Pemerintah Kota/Kabupaten Di Indonesia*. Skripsi Sarjana FPEB UPI.
- Nordiawan, D. 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Peraturan Pemerintah Nomor: 56 Tahun 2005. *Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Nomor: 105 Tahun 2000. *Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.
- Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) Nomor: 1 Tahun Per 1 Juli 2009. *Tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Serrano, C., Mar R., dan Pilar P. 2008. *Factors Influencing E-Disclosure In Local Public Administrations*. Documento de Trabajo-03 Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales Universidad de Zaragoza.
- Simanjuntak, F., Kumba D., dan Putut A. S. 2010. *Mengukur Korupsi Di Indonesia*. Laporan Survey Index Persepsi Korupsi Indonesia. Transparency International Indonesia.
- Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) No. 1. *Tentang Penyajian Laporan Keuangan*.
- Suwardjono. 2005. *Teori Akuntansi: Perekayasa Pelaporan Keuangan*. Edisi Ketiga. Yogyakarta: BPFE
- Undang-Undang Nomor: 32 Tahun 2004 pasal 184 ayat 1. *Tentang Pemerintahan Daerah*.
- \_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008. *Tentang Keterbukaan Informasi Publik*.
- [Www.setkab.go.id](http://www.setkab.go.id)

LAMPIRAN

**Tabel 1**  
**Sampel dan Observasi Penelitian**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010	497
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 yang tidak menyajikan total kewajiban	(28)
Laporan Keuangan Pemerintah Daerah tahun 2010 yang tidak tersedia	(297)
Jumlah observasi dalam penelitian.	173

**Tabel 2**  
**Pengukuran Variabel**

Variabel	Jenis Variabel	Definisi	Pengukuran
Political Competition (POLCOM)	Independen	Rasio koalisi partai pendukung kepala daerah pemenang pemilu	Jumlah anggota dewan partai pendukung kepala daerah dibagi dengan jumlah total anggota dewan
Local Government Size (SIZE)	Independen	Jumlah Pendapatan	Logaritma Natural atas Aset
Leverage (LEV)	Independen	Perbandingan antara utang dengan total aset	Total Kewajiban Pemerintah Daerah dibagi Total Aset Pemerintah Daerah
Local Government Wealth (WEALTH)	Independen	Rasio Pengelolaan Belanja	Total pendapatan asli daerah dibagi dengan total belanja
Local Government Type (TYPE)	Independen	Tipe pemerintah daerah	Jenis pemerintah daerah (Kota atau Kabupaten)
Internet Financial Local Government Reporting (IFLGR)	Dependen	Pelaporan keuangan melalui internet	Probabilitas pemerintah daerah untuk melakukan pelaporan keuangan dengan internet, 1 jika pemerintah daerah melaporkan informasi keuangannya di internet, dan 0 jika sebaliknya

Notasi:

$LN \frac{P}{P-1}$  = Probabilitas pemerintah daerah untuk Internet Financial Reporting dan Non Internet Financial Reporting

$X_1, X_2 \dots X_5$  = Pengukuran atas *POLCOM, SIZE, LEV, WEALTH, TYPE*

$\beta_0, \beta_1, \beta_2 \dots \beta_5$  = Koefisien regresi

**TABEL 3**  
**Deskripsi Statistik Data Penelitian**

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
POLCOM	173	0,02	0,71	0,2899	0,15278
SIZE	173	25,46	32,80	28,0779	0,79688
LEV	173	0,0000056	0,1526570	0,008550175	0,0164952134
WEALTH	173	0,01	1,00	0,0706	0,08451
TYPE	173	0,00	1,00	0,2312	0,42283
IFLGR	173	0,00	1,00	0,3757	0,48571
Valid N (listwise)	173				

Keterangan: POLCOM= *Political Competition*, SIZE= *Local Government Size*, LEV= *Leverage*, WEALTH= *Local Government Wealth*, TYPE= *Local Government Type*

Sumber: hasil pengolahan data

**Tabel 4**  
**Hasil Uji *Binary Logistic Regresion***

Var.	B	S.E.	Wald	Sig.
POLCOM	-2,484	1,199	4,292	0,038
SIZE	-0,026	0,260	0,010	0,920
LEV	-41,367	21,153	3,825	0,051
WEALTH	20,797	4,796	18,808	0,000
TYPE	-0,266	0,501	0,281	0,596
Constant	-0,912	0,466	3,827	0,050

Keterangan: POLCOM= *Political Competition*, SIZE= *Local Government Size*, LEV= *Leverage*, WEALTH= *Local Government Wealth*, TYPE= *Local Government Type*

Sumber: hasil pengolahan data